

# **DAMPAK KEBIJAKAN KREDIT DAN SUBSIDI PUPUK TERHADAP KEUNTUNGAN USAHATANI PADI**

**I Made Tamba  
Ni Luh Pastini**

## **ABSTRACT**

Rice is high-valued commodities since pre-independence era. The paper aims to analyze impact of credit policy and fertilizer subsidy on profit of rice farm using Policy Analysis Matrix (PAM). The method is very useful in dealing with efficiency, competitiveness, and impact of divergences caused by market or policy distortion. Result of the analysis showed that credit policy and fertilizer subsidy can be increasing profit of rice farm in Subak Semaon, Payangan Distric, Gianyar Regency.

Key words: policy, credit, subsidy, fertilizer, profit, farm, rice

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Visi pembangunan pertanian sampai tahun 2025 adalah: “Terwujudnya system pertanian industrial berkelanjutan yang berdayasaing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani”. Berdasarkan visi tersebut, maka sasaran jangka pendek yang perlu ditempuh adalah: (1) terwujudnya system pertanian industrial yang berdayasaing; (2) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri; (3) terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian; dan (4) terhapusnya masyarakat petani miskin dan meningkatnya pendapatan petani (Kementrian Pertanian, 2010).

Langkah nyata pemerintah untuk mengimplementasikan visi pembangunan pertanian tersebut adalah pencaangan program ketahanan pangan nasional, yaitu program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan kesejahteraan petani, dan program penerapan pemerintahan yang baik. Badan Ketahanan Pangan sebagai institusi penanggung jawab program ketahanan pangan, pada tahun 2010 – 2014 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi dan misi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan dengan berfokus pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Diversifikasi pangan merupakan jawaban tepat untuk menguatkan ketahanan pangan.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata, dan terjangkau. Terkait dengan upaya mewujudkan

ketahanan pangan, maka persoalannya tidak terlepas dari keberadaan tanaman padi.

Padi merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai strategis, baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial maupun politik. Produksi padi dalam negeri merupakan tolok ukur ketahanan pangan nasional. Dengan nilai strategis yang demikian, maka komoditas padi telah menjadi perhatian pemerintah, mulai dari sarana produksi (perbenihan dan pupuk), teknik budidaya, distribusi, pemasaran dan harga domestik, serta perdagangan internasional. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah melalui kewenangan dan tanggung jawabnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menguatkan ekonomi kelembagaan system usahatani padi. Salah satu dari sekian banyak kebijakant dimaksud adalah kebijakan kredit dan subsidi pupuk. Kebijakan ini dinilai sebagai suatu kewajiban, karena banyak Negara di dunia juga memberikan dukungan dan perlindungan bagi petani domestiknya.

Untuk meningkatkan produksi padi nasional, Badan Litbang Pertanian telah mengembangkan model pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah sejak tahun 1999 melalui program peningkatan produktivitas padi terpadu (P3T). Program P3T pada dasarnya mencakup empat kegiatan pokok, yaitu (1) pengelolaan tanaman terpadu, (2) system integrasi padi-ternak, (3) penguatan kelembagaan tani, dan (4) pelayanan jasa keuangan model kredit usaha mandiri. Program peningkatan produktivitas padi terpadu didasari oleh pendekatan agribisnis yang terkait erat dengan pembangunan wilayah pedesaan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan budaya lokal.

Di Provinsi Bali, program P3T merupakan pilihan rasional di tengah terjangan alih fungsi lahan sawah yang semakin fenomenal. Program peningkatan produktivitas padi secara berkelanjutan harus digelorkan, dalam rangka mempertahankan jumlah produksi padi, karena luas tanam dan panen padi di Bali cenderung menurun. Peningkatan produktivitas padi untuk mendukung ketahanan pangan dapat ditempuh melalui peningkatan mutu intensifikasi yang didukung pengembangan teknologi spesifik lokasi, kebijakan kredit ketahanan pangan dan subsidi pupuk.

Kebijakan kredit ketahanan pangan dan subsidi pupuk merupakan kebijakan yang paling populer di kalangan petani khususnya petani padi. Demikian halnya dengan petani padi di Subak Semaon Payangan Gianyar. Kebijakan kredit dan subsidi pupuk dianggap sebagai dewa penolong bagi keberlanjutan usahatani padi yang telah dilakoninya secara turun temurun. Subak Semaon merupakan subak yang wilayahnya terluas di Kecamatan Payangan dengan system usahatani padi yang mantap. Petani anggota subak dengan segala aspek permasalahannya, masih sangat membutuhkan adanya kebijakan subsidi dari pemerintah.

Namun akhir-akhir ini, para petani di Subak Semaon merasa gerah karena nikmatnya subsidi kredit dan pupuk yang telah dirasakan selama bertahun-tahun secara berangsur-angsur dipangkas oleh pemerintah. Bahkan subsidi suku bunga kredit kepada petani sesuai kesepakatan dengan IMF harus dihapus oleh pemerintah. Kebijakan kredit dan subsidi pupuk disinyalir akan berdampak terhadap tingkat keuntungan usahatani padi yang digeluti petani dan keluarganya.

## **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dianalisis dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana dampak kebijakan kredit dan subsidi pupuk terhadap keuntungan usahatani padi di Subak Semaon?

## **Tujuan Penelitian**

Penulisan *research paper* ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan kredit dan subsidi pupuk terhadap tingkat keuntungan usahatani padi di Subak Semaon.

## **LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Kredit dan Subsidi Pupuk**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan LoI antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, maka (1) Bank Indonesia tidak lagi menyalurkan kredit program, (2) pola penyaluran kredit tidak lagi melalui pola *chanelling* tetapi melalui pola *executing*, dan (3) tingkat suku bunga yang diberikan kepada petani adalah suku bunga pasar (komersial). Pemerintah mulai tahun 2004 tidak lagi memberikan subsidi bunga karena keterbatasan dana pemerintah dan dalam rangka mendidik petani untuk mandiri .

Kebijakan subsidi pupuk merupakan pilihan kebijakan yang di satu sisi membutuhkan dukungan pembiayaan cukup besar, namun di sisi lain menghasilkan manfaat positif yang dinilai lebih besar, yakni dampak sosial politik, khususnya dalam pemantapan ketahanan pangan, pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemantapan stabilitas sosial politik.

Subsidi input mempunyai relevansi langsung hanya kepada produsen output (Monke dan Pearson, 1989). Petani merupakan produsen padi sehingga subsidi pupuk merupakan subsidi input kepada petani. Subsidi pupuk berdampak pada penurunan biaya produksi sehingga keuntungan usahatani meningkat.

Alokasi anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 subsidi pupuk tercatat Rp 900 milyar, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi lebih dari Rp 16 triliun atau meningkat dua kali lipat setiap tahunnya. Apabila kecenderungan ini terus terjadi, maka pada tahun 2014 anggaran subsidi pupuk akan menembus angka Rp 20 triliun, sehingga akan sangat membenani anggaran pemerintah (Badan Litbang Kementerian Pertanian, 2010).

Hasil analisis yang didasarkan pada data sensus pertanian 2003 dan BPS *Rice Household Survey* 2008 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) sebagian besar petani padi menikmati manfaat subsidi pupuk Urea dan SP-36, (2) petani padi yang memiliki lahan relative luas (> 2 ha) memperoleh manfaat lebih besar dari subsidi tersebut, (3) petani luas (40%) menikmati 60% dari total subsidi, sementara petani kecil (60%) hanya menikmati 40% dari total subsidi, dan (4) secara umum petani (90%) membeli pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi (28%) dari harga eceran tertinggi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi pupuk dinikmati oleh petani dengan penguasaan lahan yang lebih luas (Badan Litbang Kementerian Pertanian, 2010)..

## **Dampak Kebijakan Kredit dan Subsidi Pupuk Terhadap Keuntungan Usahatani Padi**

Dampak dari subsidi pupuk secara terpisah tanpa kehadiran program kredit sangat tergantung pada tersedianya kredit di pasar informal. Dengan batas pinjaman P300/ha, penurunan harga pupuk akibat subsidi, memungkinkan adanya kelebihan penggunaan pupuk sebesar 14 kg/ha dengan meningkatnya jumlah pembiayaan dalam batas pinjaman tersebut. Penggunaan input lain berkurang P10/ha karena sejumlah input lain diganti oleh pupuk akibat dari adanya subsidi, sehingga secara relative menjadi lebih menguntungkan. Keuntungan hasil bersih dari subsidi pupuk adalah 6%, dengan peningkatan pendapatan sebesar 11%. Usahatani beririgasi dan tadah hujan memperoleh keuntungan yang hampir sama (Rosegrant dan Herdt, 1981).

Efektivitas subsidi pupuk di tingkat petani ditentukan oleh dua aspek, yaitu respon harga terhadap penggunaan pupuk dan respon pupuk terhadap produktivitas padi. Intensitas penggunaan Urea lebih dipengaruhi oleh harga gabah, sementara harga Urea relative tidak berpengaruh nyata terhadap penggunaan Urea. Sementara itu, intensitas penggunaan SP-36 dipengaruhi secara nyata oleh harga SP-36. Pada kondisi penggunaan pupuk yang sudah jauh dari tingkat optimal maupun maksimal, subsidi pupuk jelas tidak akan efektif untuk meningkatkan hasil usahatani padi. Pemberian subsidi pupuk mungkin berguna untuk mengurangi biaya usahatani padi, namun kurang bermanfaat dalam memacu peningkatan produksi maupun laba usahatani (Badan Litbang Kementerian Pertanian, 2010).

### **METODOLOGI**

Basis informasi dalam penulisan *research paper* ini diturunkan dari hasil survey usahatani padi di Subak Semaon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Tahun 2012. Pemilihan Subak Semaon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Subak Semaon merupakan subak terluas di Kecamatan Payangan dengan luas 129 hektar. System usahatani padi dilaksanakan secara konvensional dengan tetap menjunjung tinggi falsafah Tri Hita Karana.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Subak Semaon yang berjumlah 169 orang. Penentuan responden menggunakan metode quota sampling dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data primer yang dikumpulkan meliputi jumlah penggunaan masing-masing input dan jumlah output yang dihasilkan. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi perkembangan harga beras dunia, perkembangan harga dasar dan harga impor pupuk kimia, perkembangan nilai tukar dollar As terhadap rupiah, tingkat suku bunga bank, dan laju inflasi. Data sekunder dikumpulkan dari BPS, BI, dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

Dampak kebijakan kredit dan subsidi pupuk terhadap keuntungan usahatani padi dianalisis menggunakan pendekatan *Policy Analysis Matrix*

(PAM). Melalui pendekatan ini dapat dihitung secara komprehensif dan sistematis tentang keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan beberapa indikator intervensi pemerintah (Monke dan Pearson, 1989). Tabel PAM disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Tabel *Policy Analysis Matrix*

	Biaya-biaya			Keuntungan
	Penerimaan	Input <i>Tradable</i>	Faktor Domenstik	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Divergensi	I	J	K	L

Sumber: Monke dan Pearson (1989)

Keterangan:

Keuntungan privat :  $D = A - (B + C)$

Keuntungan sosial :  $H = E - (F + G)$

Output transfer :  $I = A - E$

Input transfer :  $J = B - F$

Faktor transfer :  $K = C - G$

Transfer bersih :  $L = D - H$  atau  $L = I - J - K$

Analisis Rasio:

Domestic Resource Cost (DRC) =  $G/(E - F)$

Privat Cost Ratio (PCR) =  $C/(A - B)$

Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) =  $A/E$

Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) =  $B/F$

Effective Protection Coefficient (EPC) =  $(A-B)/(E-F)$

Profitability Coefficient (PC) =  $D/H$

Subsidy Ratio to Producers (SRP) =  $L/E$

Sejumlah asumsi ekonomi makro diperlukan sebagai basis analisis dalam menggunakan matriks PAM, seperti disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Asumsi Ekonomi Makro

Asumsi Ekonomi Makro	Kuantitas
Tingkat suku bunga nominal (persen per tahun)	24,00
Tingkat suku bunga nominal (persen per musim)	8,00
Tingkat suku bunga sosial (persen per tahun)	20,30
Tingkat suku bunga sosial (persen per musim)	6,70
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (RP/\$)	9.400,00

## PEMBAHASAN

### Tingkat Keuntungan Finansial Usahatani Padi

Keuntungan finansial diperoleh dengan mencari selisih antara penerimaan total dengan biaya total (input) yang didasarkan pada tingkat harga pasar atau harga aktual. Harga tersebut telah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, seperti subsidi, suku bunga, proteksi dan bea masuk. Tingkat keuntungan finansial usahatani padi diperoleh sebesar Rp 14.034.880,00 (Tabel 3). Nilai R/C diperoleh sebesar 2,24. Angka ini memberi makna bahwa setiap Rp 1000,00 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2.240,00 Menurut Monke dan Pearson (1989) suatu aktivitas ekonomi yang memiliki keuntungan finansial di atas normal merupakan indikator bahwa pengembangan aktivitas ekonomi tersebut masih dimungkinkan. Dengan demikian usahatani padi di Subak Semaon secara finansial layak dikembangkan atau diusahakan.

Sesungguhnya dalam realita petani menikmati pendapatan dari usahatani padi yang lebih besar dari tingkat keuntungan finansial. Hal ini dapat ditelusuri dari pemilikan faktor produksi yang digunakan dalam usahatani padi. Sejumlah faktor produksi yang digunakan merupakan milik petani sendiri, seperti lahan, modal, dan sebagian tenaga kerja. Balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki petani, secara langsung menjadi pendapatan petani. Oleh karena itu, petani dengan sejumlah faktor produksi yang dimilikinya, merupakan asset penting dalam menjaga keberlanjutan usahatani padi.

### Tingkat Keuntungan Ekonomi Usahatani Padi

Kuntungan ekonomi merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total pada tingkat harga sosial. Harga sosial adalah harga internasional yang sesuai (harga CIF untuk komoditas yang diimpor dan harga FOB untuk komoditas yang diekspor) untuk mengestimasi harga efisiensi, baik untuk output maupun input yang tradable. Tingkat keuntungan ekonomi usahatani padi di Subak Semaon diperoleh sebesar Rp 9.118.822,72 (Tabel 3). Nilai R/C diperoleh sebesar 1,77. Angka ini memberi makna bahwa setiap Rp 1000,00 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1.770,00 Jadi, pengembangan usahatani padi di Subak Semaon memiliki kelayakan secara ekonomi untuk diusahakan lebih lanjut.

### Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Usahatani Padi

Untuk menganalisis keunggulan komparatif usahatani padi digunakan *Domestik Resource Cost* (DRC), yaitu rasio antara biaya domestik dengan nilai tambah output dari biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga sosial. Analisis keunggulan komparatif merupakan suatu analisis untuk menilai suatu aktivitas ekonomi ditinjau dari segi pemanfaatan sumberdaya domestik yang digunakan. Suatu usahatani komoditas tertentu dikatakan mempunyai daya saing secara internasional jika nilai  $DRC < 1$ , artinya komoditas tersebut lebih menguntungkan jika diusahakan di dalam negeri daripada diimpor. Jika  $DRC > 1$ , maka komoditas tersebut tidak memiliki daya saing internasional. Pada kondisi

demikian, maka lebih menguntungkan jika komoditas tersebut diimpor daripada diusahakan di dalam negeri karena akan terjadi pemborosan sumberdaya domestik.

Berdasarkan data pada Tabel 3, maka DRC usahatani padi diperoleh sebesar 0,51. Angka ini memberi makna bahwa untuk menghasilkan satu satuan output padi pada harga sosial diperlukan korbanan biaya sumberdaya domestik pada harga sosial sebesar 0,51. Terkait dengan perdagangan internasional, maka nilai  $DRC = 0,51$  berarti untuk menghasilkan satu satuan devisa harus mengorbankan biaya imbalan sumberdaya domestik sebesar 0,51. Jadi usahatani padi di Subak Semaon mempunyai daya saing secara internasional, karena efisien menggunakan sumberdaya domestik, sehingga layak diusahakan dalam rangka menghemat devisa.

Rasio biaya privat (*Privat Cost Ratio = PCR*) adalah perbandingan antara biaya faktor domestik dengan nilai tambah output dari biaya input tradable pada harga privat. Koefisien PCR merupakan ukuran daya saing atau efisiensi pada nilai finansial, yang sering disebut sebagai keunggulan kompetitif. Jika nilai  $PCR < 1$  maka usahatani komoditas tertentu dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif. Sebaliknya, jika nilai  $PCR > 1$  maka usahatani tersebut tidak mempunyai keunggulan kompetitif.

Hasil analisis dengan metode PAM diperoleh nilai PCR usahatani padi di Subak Semaon sebesar 0,42. Angka ini memberi makna bahwa untuk menghasilkan Rp 1,00 nilai tambah diperlukan biaya domestik sebesar Rp 0,42. Dengan demikian usahatani padi di Subak Semaon mempunyai keunggulan kompetitif sehingga sangat layak untuk diusahakan.

### Dampak Kebijakan Kredit dan Subsidi Pupuk

Dampak kebijakan kredit dan subsidi pupuk sangat urgen dianalisis untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan proteksi terhadap petani domestik. Dampak kebijakan kredit dan subsidi pupuk dari sisi petani domestik dapat positif maupun negatif. Melalui pendekatan *Policy Analysis Matrix*, maka akan diketahui dampak kebijakan kredit dan subsidi pupuk tersebut.

Tabel 3. Pendekatan *Policy Analysis Matrix* Usahatani Padi Di Subak Semaon Tahun 2012

	Biaya-biaya			
	Penerimaan	Input Tradable	Faktor Domenstik	Keuntungan
Privat	25.298.880,00	974.000,00	10.290.000,00	14.034.880,00
Sosial	20.886.222,72	2.098.400,00	9.651.000,00	9.136.822,72
Divergensi	4.412.657,28	-1.124.400,00	639.000,00	4.898.057,28

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2012

Divergensi penerimaan usahatani padi diperoleh sebesar Rp 4.412.657,28 disebabkan oleh adanya perbedaan antara harga privat dan harga sosial dari output yang diterima petani. Harga privat gabah yang diterima petani ternyata lebih

tinggi dari harga sosialnya. Hal ini menunjukkan terjadinya transfer dari konsumen kepada produsen. Dampak kebijakan pemerintah mengenai output ternyata menguntungkan petani produsen. Betapa tidak, harga dasar gabah kering panen yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 2.640,00 ternyata dilampaui oleh harga gabah yang diterima petani yang mencapai Rp 3.800,00 per kilogram. Pada musim panen Maret 2012, petani menikmati harga gabah yang sangat menguntungkan. Petani menikmati harga surplus di atas harga dasar sebesar Rp 1.160,00. Fakta ini sekaligus membantah adanya sinyalemen yang menyatakan bahwa harga gabah yang diterima petani selalu di bawah harga dasar.

Divergensi input tradable diperoleh sebesar Rp -1.124.400,00. Fakta ini menunjukkan bahwa petani sebagai konsumen membayar harga input yang lebih murah dari harga sosialnya. Nilai negatif pada divergensi input tradable menunjukkan adanya kebijakan subsidi. Jadi usahatani padi di Subak Semaon menerima subsidi input. Namun demikian, petani membayar harga pupuk lebih mahal dari harga subsidi. Untuk pupuk Urea petani membayar lebih mahal 12,5 % dari harga subsidi, sedangkan untuk pupuk NPK petani membayar lebih mahal 8,7% dari harga subsidi.

Nilai divergensi faktor domestik diperoleh sebesar Rp 639.000,00. Nilai divergensi faktor domestik yang positif terutama disebabkan oleh nilai sewa lahan privat di atas nilai sewa sosial dari komoditas alternative terbaik di Subak Semaon, yaitu jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman favorit yang diusahakan petani ketika musim tanam palawija. Berdasarkan hasil analisis keuntungan usahatani jagung diperoleh keuntungan sebesar Rp 3.600.000,00 per hektar per musim, sedangkan jika lahannya disewakan diperoleh uang sewa sebesar Rp 4.000.000,00 per hektar per musim. Kenyataan ini menguatkan adanya fenomena peningkatan jumlah petani yang menyewakan lahannya, karena dianggap lebih menguntungkan dan mereka terbebas dari risiko gagal panen.

Faktor tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap divergensi faktor domestik pada usahatani padi, karena tidak ada perbedaan upah tenaga kerja pada harga privat dan sosial. Hal ini terjadi karena tenaga kerja yang terlibat dalam usahatani padi di Subak Semaon tergolong sebagai tenaga kerja *unskill*.

Divergensi faktor domestik di Subak Semaon dipengaruhi oleh biaya modal. Hal ini terjadi karena tingkat suku bunga privat lebih tinggi dari suku bunga sosial. Tingkat suku bunga privat diperoleh dari informasi tingkat bunga kredit formal di lokasi penelitian (KUD Payangan dan LPD Semaon), yaitu sebesar 24% per tahun. Dalam penelitian ini dipergunakan tingkat bunga nominal bukan tingkat bunga riil, karena seluruh komponen biaya bukan modal dalam anggaran PAM telah mencerminkan dampak inflasi, sehingga tidak konsisten jika dampak inflasi dieliminasi hanya pada komponen modal.

Tingkat bunga sosial yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penjumlahan dari *social opportunity cost of capital* yang diasumsikan sebesar 15% per tahun ditambah dengan laju inflasi nasional tahun 2011 sebesar 5,3% sehingga tingkat suku bunga sosial sebesar 20,3% per tahun atau 6,7% per musim tanam padi. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat bunga sosial lebih rendah dari tingkat bunga nominal sehingga hal ini memperkecil divergensi faktor domestik.

Tingkat suku bunga nominal yang lebih besar cenderung akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi khususnya pada usahatani padi.

Kondisi faktual menunjukkan bahwa semua petani responden di Subak Semaon musim tanam 2011/2012 tidak ada yang memanfaatkan jasa perkreditan untuk membiayai usahatani padi, baik kredit formal maupun informal. Petani hanya memanfaatkan akumulasi harta sendiri untuk membiayai usahatani padi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan modal usahatani padi relatif tidak besar, sehingga dapat dipenuhi dari modal sendiri. Di lokasi penelitian tersedia pasar kredit informal yang melayani kredit volume mikro dan tanpa persyaratan formal, namun bunganya sangat tinggi sehingga jarang dimanfaatkan oleh petani untuk membiayai usahatani padi.

Divergensi keuntungan usahatani padi diperoleh sebesar Rp 4.916.057,28. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat kebijakan insentif pada usahatani padi di Subak Semaon yang melahirkan keuntungan pada petani. Hal ini sesuai dengan kajian Badan Litbang Pertanian (2010), yang menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk merupakan kebijakan insentif bagi usahatani padi. Kebijakan subsidi pupuk ternyata mampu memberikan keuntungan yang signifikan terhadap petani yang melakukan usahatani padi. Hal ini disebabkan penggunaan pupuk oleh petani di Subak Semaon yang masih dalam ambang dosis yang direkomendasikan.

### **Tingkat Proteksi**

Ada sejumlah rasio yang berhubungan dengan tingkat proteksi yang digunakan untuk menduga distorsi kebijakan pemerintah pada usahatani padi. Rasio-rasio tersebut diperoleh dari nilai-nilai yang tersaji pada matrik PAM (Tabel 3). *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur divergensi dalam penerimaan. Nilai NPCO usahatani padi di Subak Semaon diperoleh sebesar 1,21 yang berarti petani menikmati harga output lebih tinggi sebesar 21% dibandingkan harga paritas impor. Dalam penentuan harga sosial padi digunakan harga paritas impor karena Indonesia merupakan Negara net impor beras. Jadi dalam melakukan usahatani padi, petani di Subak Semaon mendapatkan proteksi output dari pemerintah. Instrument yang digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap usahatani padi (produksi beras) adalah dalam bentuk tariff impor beras. Melalui pengenaan tariff terhadap impor beras, maka harga beras impor akan meningkat sehingga akan mengurangi tekanan terhadap harga beras dalam negeri.

*Nominal Protection Coefficient on Input* (NPCI) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur divergensi input tradable. Nilai NPCI usahatani padi di Subak Semaon diperoleh sebesar 0,46 yang berarti petani membayar harga input tradable lebih murah sebesar 54% dibandingkan harga internasional. Adanya harga input tradable yang lebih murah tersebut merupakan bukti nyata dari perlindungan pemerintah terhadap petani domestic dalam bentuk subsidi pupuk.

*Effective Protection Coefficient* (EPC), adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dampak gabungan *policy transfers input* dan output tradable. *Effective Protection Coefficient* (EPC) adalah rasio nilai tambah dalam nilai finansial dengan nilai tambah dalam nilai ekonomi yang diperoleh sebesar 1,29. Nilai EPC

>1 memberi makna bahwa nilai tambah privat lebih besar dari nilai tambah sosial, sehingga terdapat insentif positif dari pemerintah pada usahatani padi di Subak Semaon. Besarnya proteksi efektif yang diterima petani disebabkan oleh adanya harga output yang diterima petani lebih mahal 21% dari harga sosial dan harga input tradable yang dibayar petani lebih murah 54% dari harga sosialnya.

*Profitability Coefficient (PC)* adalah rasio yang mengukur dampak seluruh transfer terhadap keuntungan privat. Nilai PC merupakan ukuran relative transfer bersih yang mengakibatkan keuntungan finansial lebih besar atau lebih kecil dari keuntungan ekonomi. Transfer bersih merupakan inti dari hasil analisis PAM. Nilai PC usahatani padi di Subak Semaon diperoleh sebesar 1,54. Angka ini memberi makna bahwa keuntungan privat adalah 1,54 kali keuntungan ekonomi (sosial). Jadi secara keseluruhan berbagai kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan kredit dan subsidi pupuk) dapat meningkatkan keuntungan usahatani padi.

*Subsidy Ratio to Producers (SRP)* adalah ukuran dari gabungan seluruh *transfer effects* yang terjadi. Rasio ini adalah perbandingan antara nilai net transfer dengan nilai output yang dihitung pada tingkat harga internasional. Nilai SRP usahatani padi di Subak Semaon diperoleh sebesar 0,23. Angka ini memberi makna bahwa divergensi keuntungan finansial dan ekonomi pada usahatani padi di Subak Semaon sebesar 23% dari pendapatan kotor. Besarnya transfer positif menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang menguntungkan pada petani.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan atas hasil analisis menggunakan matrik PAM, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kredit dan subsidi pupuk dapat meningkatkan keuntungan usahatani padi. Pengembangan usahatani padi di Subak Semaon memberikan keuntungan secara privat maupun sosial serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

### **Saran**

Berdasarkan atas kesimpulan di atas, maka disarankan agar petani dapat memanfaatkan pupuk bersubsidi secara efisien dalam rangka meningkatkan keuntungan dan daya saing usahatani padi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Kementerian Pertanian. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk dan HPP Gabah Tahun 2010. Jakarta: Kementerian Pertanian R I.
- Kementerian Pertanian R I. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014. Jakarta: Kementerian Pertanian R I.
- Monke, E A. dan Pearson, S R. 1989. The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Pearson S. R., Gotsch C., dan Bahri S. 2003. Application of the Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture.
- Rosegrant M.W dan Herdt R W., 1981. Simulating the Impacts of Credit Policy and Fertilizer Subsidy on Central Luzon Rice Farms, the Philippines. *American Journal of Agricultural Economics Vol. 63, No. 4, November 1981.*